PERANAN BANGSAWAN BONE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DARI SWAPRAJA KE KABUPATEN

(*The Role of Bone Nobleman in The Government System from Swapraja to Regency*)

Risma Widiawati

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan

Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221

e-mail: rismawidiawati@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Histori Artikel Diterima: 30 Juni 2018 Direvisi: 27 Agustus 2018 Disetujui: 5 November 2018</p> <hr/> <p>Keyword <i>Nobleman, Bone, Swapraja</i></p> <p>Kata Kunci <i>Bangsawan, Bone, Swapraja</i></p>	<p><i>Bone Regency as part of South Sulawesi is a very interesting area to discuss. This area is not only part of the history of South Sulawesi, but also a historical flow of South Sulawesi. the existence of nobles who are so attached to the joints of the lives of the people of Bone is still interesting to be examined to this day. Based on this, the article aims to reveal the role of Bone nobility in the swapraja government system to the regency (1950 - 1960). The political development of the government during this period was seen as sufficiently influencing the political dynamics of the government in Bone Regency which continued even today. The method used is the method of historical research with four stages, namely, heuristics, criticism (history), interpretation, and presentation (historiography). The results of the study show that after the transition from swapraja to regency, the role of nobility is still very calculated. But it is no longer like in the period before the transition, where the government was ruled by the king / aristocracy. At this time the level of intelligence is also taken into account. Apart from the fact that the structure of the government is indeed different because the process of appointing head of government is also different. But in general the role of nobility after the transition was not much different, where there were still many nobles holding power.</i></p> <hr/> <p>ABSTRAK</p> <p>Kabupaten Bone sebagai bahagian dari Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang sangat menarik untuk dibicarakan. Daerah ini bukan saja merupakan bagian dari sejarah Sulawesi Selatan, tetapi juga merupakan arus sejarah Sulawesi Selatan. keberadaan bangsawan yang begitu melekat di dalam sendi kehidupan masyarakat Bone masih menarik untuk ditelisik sampai hari ini. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang peranan bangsawan Bone dalam sistem pemerintahan swapraja ke kabupaten (1950 – 1960). Perkembangan politik dari pemerintahan selama periode ini dipandang cukup mempengaruhi dinamika politik dari pemerintahan di Kabupaten Bone yang berlangsung bahkan sampai sekarang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu, heuristik, kritik (sejarah), intepretasi, dan penyajian (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah peralihan dari swapraja ke kabupaten, peranan bangsawan masih sangat diperhitungkan. Namun tidak lagi seperti pada masa sebelum peralihan, di mana pemerintahan dikuasai oleh raja/aristokrasi. Pada masa ini tingkat kecerdasan juga diperhitungkan. Selain karena struktur pemerintahannya memang berbeda juga karena proses pengangkatan kepala pemerintahan juga berbeda. Namun secara umum peran bangsawan setelah masa peralihan tidak jauh berbeda, di mana masih banyak bangsawan yang memegang kekuasaan.</p>

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan masa lampau yang hanya terjadi sekali saja dan tidak akan mungkin dapat berulang kembali. Namun demikian masa lampau dapat dijadikan cerminan masa kini dan masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah banyak memberikan sumbangan yang berarti bagi masa kini. Hanya dengan demikian sejarah menjadi masa lampau yang hidup dalam ingatan manusia. Ingatan tentang masa lampau dapat bermanfaat positif jika realitas obyektifnya didukung oleh analisa kritis terhadap kesaksian yang masih dapat diterima.

Bone sebagai bahagian dari Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang sangat menarik untuk dibicarakan. Daerah ini bukan saja merupakan bagian dari sejarah Sulawesi Selatan, tetapi juga merupakan arus sejarah Sulawesi Selatan. Di mana antara tahun 1950-1960 Bone mengalami perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan Swapraja menjadi pemerintahan Kabupaten yang melibatkan pembesar-pembesar kerajaan Bone dan pemerintahan RI.

Nampaknya budaya panutan dalam masyarakat Sulawesi Selatan di jaman perang kemerdekaan masih sangat kuat berperan dalam kehidupan kita. Tingkah laku dan perbuatan mereka patuh sepenuhnya

kepada apa yang dinyatakan dan apa yang diperintahkan oleh para bangsawannya. Bangsawan merupakan bagian dari penguasa daerah. Umumnya penempatan dan pengangkatan seorang penguasa daerah atau raja sangat bergantung pada kemurnian kebangsawannya, karena kemurnian daerah menunjukkan kepada kepentingan derajat kebangsawanan. “Semakin tinggi derajat kebangsawanan seseorang makin banyak pula hak-hak istimewa yang dimilikinya” (Kadir, 1994 : 28).

Pekerjaan utama bangsawan adalah bidang pemerintahan, khususnya mengatur penggunaan tanah dan menyelesaikan persengketaan. Baik kedudukan politik maupun kekuasaan ekonomi berkaitan erat dengan status kelas, karena pada umumnya diterima bahwa tidak ada orang yang dapat memaksakan kekuasaan atas orang lain yang berpangkat lebih tinggi dari pada dia sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa golongan bangsawanlah yang menguasai tanah dan memegang posisi monopoli atas kekuasaan.

Walaupun demikian, derajat kebangsawanan bukanlah merupakan satu-satunya faktor pendukung kedudukan seseorang dalam hirarki kekuasaan. Pada dasarnya terdapat persyaratan lain sebagai penopang seseorang untuk menduduki kepangkatan kekuasaan seperti kepandaian, keberanian, kejujuran, kemanusiaan dan adil.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagian besar kawasan Sulawesi Selatan dikuasai oleh Belanda yang kemudian memperkenalkan dan melaksanakan sistem politik baru, yakni melaksanakan sistem birokrasi dan administrasi Barat. Namun demikian kehidupan adat setempat tidak mengalami perubahan. Itulah sebabnya pada saat revolusi pada tahun 1945, masyarakat Sulawesi Selatan tidaklah mengalami revolusi sosial. Hubungan antara raja dan kelompok feodal dengan anggota masyarakat tetap normal sampai diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dampak dari adanya hubungan yang harmonis antara kelompok *principality* (kerajaan) dengan masyarakat, khususnya ketika revolusi meletus, maka masyarakat menerima kepemimpinan raja selama revolusi berlangsung. Tidak ada rasa kecurigaan rakyat kepada mereka semua berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat di daerah-daerah yang sudah banyak dipengaruhi pendidikan dan alam pikiran Barat serta pandangan hidup baru, mungkin memandang jabatan raja itu sudah tidak lagi meliputi tugas mati. Dalam keadaan demikian pendemokrasian swapraja berarti penghapusan jabatan raja yang berarti pula penghapusan swapraja itu.

Apabila jabatan raja tidak dihapuskan maka swapraja itu tetap ada.

Sesungguhnya istilah swapraja dapat diartikan sebagai suatu daerah yang berpemerintahan sendiri dan berhubungan erat dengan jabatan raja. Soal dapat tidaknya swapraja dihapuskan adalah soal dapat tidaknya jabatan raja di suatu daerah dihapuskan. Jika jabatan raja itu tetap dihapuskan, maka swapraja yang bersangkutan dapat dihapuskan pula. Adalah kebijaksanaan politik untuk menentukan apakah di suatu daerah otonomi jabatan raja itu dapat dihapuskan atau tidak. Kalau kebijaksanaan politik itu dilakukan atas dasar kerakyatan, maka penetapan dapat tidaknya jabatan raja dihapuskan di suatu daerah akan bergantung pada kehendak yang sebenarnya dari rakyat yang bersangkutan.

Berdasar dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan tentang peranan bangsawan Bone dalam sistem pemerintahan Swapraja ke Kabupaten. Perkembangan politik dari pemerintahan selama periode ini dipandang cukup mempengaruhi dinamika politik dari pemerintahan di Kabupaten Bone yang berlangsung bahkan sampai sekarang.

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah “bagaimana peranan bangsawan Bone dalam sistem

pemerintahan dari Swapraja ke Kabupaten”. Batasan temporal dimulai pada tahun 1950 merupakan masa pemerintahan swapraja di Bone dan berakhir pada tahun 1960 yang merupakan tonggak dimulainya sistem pemerintahan dengan bentuk kabupaten, yang disesuaikan dengan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi.

METODE

Sebagai suatu kajian ilmiah yang pembahasannya terfokus pada masa lampau, maka penulisan menggunakan metode historis, yaitu suatu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah dengan melalui tahapan tertentu. Dalam penerapannya, metode ini menempuh tahapan-tahapan kerja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Notosusanto (1971 : 17) yaitu, Heuristik, Kritik (Sejarah), Interpretasi, dan Penjajian. Sesuai dengan metode historis tersebut di atas, maka langkah proses dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah :

1. Heuristik

Tahapan ini merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber. Adapun langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan sumber sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan mendatangi lokasi atau daerah yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Tahap pengumpulan data pada kegiatan lapangan dapat ditempuh dengan cara wawancara.

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan orang-orang yang dianggap mengetahui akan suatu peristiwa yang dibahas. Dalam melakukan wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam struktur dan organisasi pemerintahan di Bone baik pada masa Swapraja maupun pada masa kabupaten.

Dalam melakukan wawancara ini, penulis tentunya dihadapkan pada berbagai jenis golongan. Olehnya itu, pelaksanaan wawancara dibagi dalam dua bagian cara mendapatkan data, yakni dengan menggunakan informan kunci atau orang yang mengetahui tentang peranan bangsawan Bone terhadap perubahan sistem pemerintahan dari Swapraja ke Kabupaten. Selain itu peneliti juga menggunakan informan pangkal, yakni orang yang mampu memberikan informasi maupun data tambahan tentang apa yang telah diberikan oleh informan kunci.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis, pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan yang bebas dan wajar dengan para informan. Hal ini dimaksudkan agar para informan tidak merasa terpaksa memberikan keterangan yang diperlukan oleh penulis. Hasil dari wawancara ini dapat direkam atau dicatat untuk selanjutnya diperbaiki

pada saat penyusunan laporan penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi penelitian. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh peneliti sifatnya obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penelitian Pustaka

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku tentang peranan bangsawan dan sistem pemerintahan baik itu pemerintahan pada masa Swapraja maupun pada masa kabupaten, sumber tersebut dapat diperoleh pada pemerintah daerah, toko buku maupun perpustakaan. Dengan demikian dapat digambarkan secara jelas mengenai peranan bangsawan Bone dalam sistem pemerintahan dari Swapraja ke kabupaten.

Adapun buku-buku yang dikumpulkan oleh penulis yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan dibahas adalah :

- a. Bone selayang pandang oleh Andi Muhammad Ali, Watampone 1985.
- b. Sejarah perjuangan kemerdekaan RI di Sulawesi Selatan 1945-1950 oleh Harun Kadir, penerbit Lephass, Ujung Pandang 1982.
- c. Elit dalam perspektif sejarah oleh Sartono Kartodirjo, penerbit LP3ES, Jakarta 1981.

- d. Sejarah pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang oleh Bayu Suryaningrat, penerbit Dewaruci Press, Jakarta 1981.

- e. Sejarah pemerintahan di Indonesia oleh Irawan Soejito, penerbit Pradnya Pramita, Jakarta 1984.

- f. Sejarah birokrasi pemerintahan di Indonesia dahulu dan sekarang oleh P.J. Suwarno, penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta 1989.

2. Kritik Sumber

Pada tahap kritik, sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik dilakukan penyaringan atau penyeleksian. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji sumber melalui kritik ekstern dan kritik intern. Untuk mengetahui penjelasan dari kedua aspek tersebut, baik ekstern maupun intern akan diuraikan sebagai berikut :

Kritik ekstern atau kritik luar dilakukan untuk meneliti keaslian sumber, apakah sumber tersebut valid, asli, dan bukan tiruan, sumber tersebut utuh dalam arti belum berubah baik bentuk maupun isinya. Penelitian sumber yang berkaitan dengan peranan bangsawan Bone dalam sistem pemerintahan dari Swapraja ke Kabupaten ditulis setelah peristiwa tersebut berlangsung, sehingga kritik terhadap bahan, jenis tulisan gaya bahasa dari tulisan tidak dapat dilakukan.

Kritik ekstern hanya dapat dilakukan pada sumber yang menjadi rujukan penulis. Di samping itu penilaian juga dilakukan terhadap latar belakang penulis, asal daerah, waktu penulisan serta memperhatikan apakah diantara penulis tidak saling mengutip.

Kritik intern atau kritik dalam dilakukan untuk meneliti sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian dan penulisan artikel peneliti. Untuk mengetahui keabsahan suatu sumber, maka dapat dilakukan dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain dalam masalah yang sama. Setelah mendapatkan data yang akurat dan kredibel yang dilakukan melalui tahap kritik, maka langkah selanjutnya diadakan interpretasi terhadap fakta sejarah.

3. Interpretasi

Setelah kritik sumber selesai, kemudian diadakan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan terhadap fakta tersebut seobyektif mungkin. Dengan demikian sangat diperlukan kehati-hatian atau integritas seorang penulis untuk menghindari interpretasi yang subyektif terhadap fakta. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi arti terhadap aspek yang diteliti, mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya agar ditemukan kesimpulan atau gambaran peristiwa sejarah yang ilmiah.

4. Penulisan Sejarah atau Historiografi

Penulisan sejarah atau historiografi ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian

prosedur kerja dari metode historis. Hasil penulisan tersebut, merupakan hasil dari penemuan sumber-sumber yang diseleksi melalui kritik baik ekstern maupun intern, kemudian diinterpretasi, lalu disintesa yang selanjutnya disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

1) Bangsawan Pada Zaman Swapraja (1950-1959)

Kedatangan *To Manurung* yang melahirkan golongan bangsawan diterima dengan baik oleh rakyat. Kelompok bangsawan mempunyai peranan yang sangat besar sebagai pemimpin terhadap rakyat di Sulawesi Selatan dan kemajuan negeri (kerajaan) sebelum datangnya pengaruh bangsa Eropa di Sulawesi Selatan. Sebagai kelompok yang berpengaruh terhadap rakyat pengikutnya, maka kelompok bangsawan ini tidak lepas dari penilaian rakyat tempat bangsawan tersebut berpengaruh.

Dalam masyarakat berlaku norma aristokrasi yang menggariskan perlakuan masyarakat kepada kelompok bangsawan oleh masyarakat biasa seperti dipuja, sehingga kedudukan yang demikian ini, kelompok bangsawan diperlakukan secara istimewa dalam masyarakat sebagai golongan yang berdarah biru. Sebagai kelompok

pemegang kekuasaan tentunya kehidupan dan masa depannya terjamin, karena mereka memperoleh jabatan sesuai dengan tingkat kebangsawannya. “Dalam sistem kenegaraan masyarakat tradisonal Sulawesi Selatan, termasuk di Bone, status sosial seseorang dipengaruhi secara langsung atas berbagai jabatan-jabatan dalam kenegaraan” (Palimmei, wawancara tanggal 27 Juni 2017).

Kaum bangsawan meskipun sedikit namun mereka memperoleh perlakuan istimewa dalam masyarakat.

Pekerjaan dalam bidang pemerintahan merupakan hak istimewa kaum bangsawan yang secara internal masih dapat dibedakan dalam berbagai derajat dan lapisan. Meskipun kedudukan raja (bangsawan) dalam kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar termasuk di kerajaan Bone dipilih berdasarkan keturunan, namun ketentuan dan pemilihannya lebih banyak ditetapkan oleh Hadat, yang dalam beberapa peristiwa sejarah dapat berbeda dengan keinginan raja sendiri mengenai calon penggantinya.

Palace of the Sultan of Bone, c. 1900-1920
Sumber: www.tropenmuseum.com

Setelah kedatangan bangsa Eropa di Sulawesi Selatan, khususnya bangsa Belanda, maka pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Belanda.

Namun dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari pihak Belanda masih sering mengalami hambatan-hambatan dari rakyat yang dipelopori oleh para

bangsawan yang tidak senang terhadap penjajahan Belanda. Kedudukan bangsawan yang sangat kuat itu, harus dengan cepat diperhitungkan oleh Belanda yang kebijaksanaan aslinya adalah menyerang para bangsawan atau penguasa dengan harapan dapat menarik simpatik dari bawahan mereka yang tertekan.

Salah satu usaha Belanda yang menghasilkan keuntungan bagi Belanda selanjutnya adalah dengan usaha memberikan pemerintahan sendiri kepada bangsawan yang disetujui oleh Gubernur Selebes waktu itu (S.L. Couvreur). Daerah swapraja diberi kebebasan untuk melestarikan pemerintahan tradisionalnya dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam kontrak panjang dan pernyataan pendek. Sedangkan untuk mengintegrasikan dengan pemerintahan pusat, Belanda menempatkan pejabatnya di daerah-daerah yang bersangkutan. Pejabat-pejabat tersebut dapat berpangkat *Gubernur, Resident, Asisten Resident* dan

Controleur, tergantung pada besar kecilnya daerah swapraja yang diawasinya. Pejabat Belanda tersebut bertugas mengawasi dan mendampingi pemerintahan tradisional.

Pada tahun 1931, Gubernur Selebes memberikan kesempatan kepada bangsawan atau pemuka rakyat untuk membentuk pemerintahan sendiri yang disebut *zelfbestuur landschap* atau yang dikenal dengan swapraja untuk tiap kerajaan termasuk kerajaan Bone. Setelah terbentuknya pemerintahan *zelfbestuur Bone* yang dipimpin oleh seorang *Tomarilaleng* dengan *Hadat Tujuhnya*, maka pada tanggal 2 April 1931 dilantiklah La Tenri Sukki Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone, ia tetap harus melaporkan segala kegiatan pemerintahannya kepada *Controleur* namun ia tetap berusaha menjaga pertentangan yang terjadi antara pemerintahan tradisionalnya dengan pemerintahan Hindia Belanda (Rismawidiawati, 2016: 203-204).

Dewan Hadat Tujuh (*Ade Pitue Bone*)

Sumber: www.KITLV.com

Kembalinya Andi Mappanyukki menjadi raja Bone setelah 25 tahun tidak berarti bahwa pemerintahan modern yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak berlaku. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan aturan cukup ketat dalam hal pengangkatan seseorang di dalam pemerintahannya. Walaupun banyak bangsawan karena kemampuan dan kecakapannya mampu menduduki jabatan seperti *regent* (Mappangara, 2004: 183).

Kepala dan penguasa yang lebih tinggi secara kurang mencolok berada di bawah pemerintahan Eropa

dalam urutan hierarki, karena ditempatkan dalam suatu hierarki paralel di bawah bimbingan pegawai sipil kolonial. Dalam satu hal ada pemisahan antara kewibawaan dan kekuasaan. Kewibawaan tetap berada di tangan penguasa tradisional (bangsawan) sekalipun kekuasaan di tangan Pemerintahan Hindia Belanda. Para penguasa tradisional tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri tanpa persetujuan dari pemerintah Belanda. Para pegawai pemerintah kolonial kekurangan kewibawaan atas penduduk dan

bergantung pada kerjasama dengan masyarakat setempat untuk memastikan kepatuhan rakyat terhadap perintah-perintah pemerintah.

Khusus kaum bangsawan di Sulawesi Selatan termasuk di daerah Bone dapat dilihat peranan dan keterlibatannya dalam proses perjuangan membela negara melawan Belanda, mempunyai andil yang sangat besar dan berarti hingga terwujudnya proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Sampai pada periode Andi Mappanyukki di zaman revolusi 1945, raja dan rakyat Sulawesi Selatan terus menerus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Konsekuensi dari perjuangan Andi Mappanyukki dan putranya Andi Pangerang Petta Rani di zaman revolusi 1945, Andi Mappanyukki kemudian ditahan oleh Belanda bersama putranya dan kemudian diasingkan ke Rantepao. Tahta Andi Mappanyukki sebagai raja Bone yang dilantik oleh Belanda pada tahun 1931 dicopot dari tangannya. Kemudian Belanda mengangkat raja Bone untuk menggantikan Andi Mappanyukki.

Namun demikian Andi Mappanyukki sendiri telah mengundurkan diri pada tahun 1946 dari jabatannya karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda, kemudian ia diasingkan

ke Rantepao Tana Toraja. “Selanjutnya Belanda mengangkat Andi Pabbenteng sebagai Raja Bone seorang lawan politik Andi Mappanyukki dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda” (Andi Mappasissi Petta Awangpone, wawancara tanggal 27 Juni 2017).

Andi Pabbenteng diangkat menjadi raja Bone pada tanggal 19 Juni 1946, sekaligus sebagai kepala keamanan kerajaan Bone oleh Belanda. Andi Pabbenteng mulai menanamkan kedisiplinan selaku seorang pemimpin, juga mengembalikan harga dirinya setelah diasingkan oleh raja Andi Mappanyukki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadir (1994 : 57) sebagai berikut :

Program kerja yang paling utama pada awal pemerintahannya adalah menciptakan keamanan dalam kerajaan Bone. Cara kedisiplinan dalam memimpin menyebabkan para pengikut Andi Mappanyukki mulai dari raja-raja kecil sampai pada pegawai-pegawai dan sebagian aparat kerajaan bergeser secara bertahap mengikuti kepala keamanan yang baru ini.

Namun pada 2 Maret 1953, Andi Pabbenteng dan seluruh anggota dewan adat tujuh melepaskan jabatan. Walaupun demikian ada juga sumber yang mengatakan bahwa Andi Pabbenteng dipecat sebagai raja Bone karena rakyat sudah tidak menghendakinya lagi karena dianggap bekerja sama dengan Belanda

walaupun. Hal ini tentu masih butuh penelitian lebih lanjut (Rismawidiawati, 2016: 208). Terlepas dari kontroversi kedudukannya sebagai raja yang bekerjasama dengan Belanda, Andi Pabbenteng dimasanya mampu membawa keamanan di tanah Bone. Andi Mappanyukki akhirnya dikembalikan lagi menjadi Kepala Daerah dan rakyat masih menyebutnya Raja Bone.

Kharisma dan kewibawaan Andi Mappanyukki di kalangan bangsawan tidaklah perlu diragukan lagi. Dia secara tidak resmi menjadi pimpinan di kalangan penguasa-penguasa feodal di Sulawesi Selatan. Dengan posisinya ini Andi Mappanyukki dapat pula dikatakan sebagai tokoh sentral di kalangan kaum aristokrat. Gagasan dan nasihatnya terhadap kelompoknya, umumnya didengarkan dan tentu saja diikuti.

Kelompok bangsawan meskipun menduduki posisi sebagai elite strategis di masyarakat atau dalam struktur sosial sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau kekuasaan tidaklah memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak. Tingkah laku raja dan bangsawan dibatasi oleh norma sosial yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemerintahan dan kontrak sosial dalam terbentuknya swapraja.

Sejak Belanda menduduki wilayah Sulawesi Selatan mulai berdirinya VOC sampai runtuhnya dan digantikan secara langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda, raja dan kelompok bangsawan tidak pernah berhenti berjuang melawan Belanda. Demikian pula rakyat selalu mendukung dan membantu secara langsung. Demikian juga dalam perjuangan kemerdekaan, kelompok bangsawan Sulawesi Selatan telah berperan sebagai pendukung nasionalisme. Dengan demikian kelompok bangsawan dalam peranannya sebagai pendukung nasionalisme tidak hanya memberikan kemudahan berupa sumbangan untuk kepentingan tetapi juga menjadi pemimpin dalam operasi militer melawan Belanda.

Seperti yang dilakukan oleh Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone ke-32 dengan putranya Andi Pangerang Petta Rani, yang berpihak kepada Republik tanpa memperdulikan tahtanya, yang bagi kelompok bangsawan lainnya mungkin sukar untuk ditinggalkan dalam menjatuhkan putusan untuk tetap setia kepada Republik. Tetapi bagi Andi Mappanyukki yang berpatriotik dan nasionalistik ini bukanlah menjadi kendala dalam mendukung perjuangan

untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan.

2) Bangsawan Pada Masa Kabupaten (1959-1960)

Bangsawan setelah peralihan dari swapraja ke kabupaten masih besar pengaruhnya dalam masyarakat. Pengelolaan atas dasar keturunan di Sulawesi Selatan termasuk di Bone setelah berbentuk kabupaten sudah jauh berbeda dengan keadaan disaat masih jayanya tradisi kerajaan, di mana hampir semua bidang kekuasaan dimonopoli oleh kaum bangsawan. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang sangat berbeda satu dengan yang lain.

“Pertama, dari sekelompok kecil kaum bangsawan yang kebetulan berpendidikan rendah yang menganggap bahwa masyarakat masih menghargai pembagian golongan manusia berdasarkan atas keturunan” (Mukhlis, 1982: 56). Artinya rakyat biasa tetap tunduk dan menghargai keturunan seperti sedia kala. Bahkan masih ada dari kelompok-kelompok yang beranggapan bahwa di suatu saat nanti kebesaran kerajaan akan muncul kembali.

Pandangan kedua, terdapat dalam kalangan masyarakat luas baik dari kalangan rakyat biasa maupun dari

golongan bangsawan yang berpendidikan relatif lebih tinggi. Kelompok ini menganggap bahwa tidak ada lagi penggolongan atas keturunan tersebut, dengan alasan bahwa dengan proklamasi kemerdekaan sesuai dengan azas demokrasi yang dianut tidak lagi diakui pengelompokan secara ketat berdasarkan keturunan.

Sulawesi Selatan adalah suatu masyarakat yang seringkali digambarkan sebagai masyarakat feodal atau tradisional. Sulawesi Selatan merupakan suatu masyarakat dengan karakter bangsawan yang kuat dan juga mempunyai ketaatan yang kuat terhadap aturan hukum adat. “Selain itu Sulawesi Selatan merupakan masyarakat yang bercirikan persaingan ketat, di mana seseorang dinilai tidak hanya statusnya yang diperkirakan, tetapi juga oleh kualitas pribadinya (Harvey, 1989: 19).

Khusus kaum bangsawan di Sulawesi Selatan utamanya di daerah Bone dapat dilihat peran dan keterlibatannya dalam proses perjuangan membela negara melawan penjajah, mempunyai andil yang besar dan berarti hingga terwujudnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dari fakta sejarah, dapat diketahui bahwa sistem feodalisme atau kebangsawanan yang hidup di Sulawesi

Selatan, dijiwai oleh unsur dan semangat demokrasi. Menurut Abdullah (1990: 52) sebagai berikut :

Di mana raja atau kelompok bangsawan meskipun menduduki posisi sebagai elit strategis di masyarakat atau dalam struktur politik atau kekuasaan, tidaklah memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak. Semua tingkah laku bangsawan sebagai seorang raja serta kekuasaannya telah dibatasi bersama dengan perjanjian pemerintahan atau dalam kontrak sosial sejak terbentuknya organisasi kenegaraan mereka.

Namun demikian, meskipun telah hidup dalam sistem feodalisme selama ratusan tahun tetapi sistem feodalisme tidaklah menjadikan kehidupan mereka terikat terhadap tradisi yang mematikan atau beku. Juga tidak menyebabkan hidup mereka di masyarakat dieksploitir oleh sistem yang berlaku, tidak mematikan unsur kreativitas individu atau mematikan pengembangan daya cipta dan tidak membuat hati anggota masyarakat terikat dan diliputi oleh perasaan ketegangan. Kondisi kehidupan yang demikian tercipta karena kelompok penguasa yang memimpin masyarakat dikontrol langsung oleh setiap kebijaksanaannya oleh rakyat.

Sampai pada pendudukan kolonial Belanda dan terbentuknya daerah-daerah swapraja di Sulawesi

Selatan, bangsawan setempat tetap diberikan kedudukan sebagai kepala dari daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri. Di daerah-daerah yang dikuasai secara tidak langsung oleh Belanda para bangsawan mendapat pengakuan formal lebih banyak mengenai kedudukannya daripada daerah-daerah yang dikuasai langsung. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuasaan nyata dan kebebasan karena dikuasai Belanda. *Residen* dan *controlir* adalah penguasa yang sesungguhnya.

Dalam babakan terakhir perjuangan mencapai kemerdekaan, kelompok aristokrat/bangsawan di Sulawesi Selatan telah melibatkan diri secara langsung dalam berbagai aksi perjuangan fisik yang dipimpinnya bersama rakyat. Peranan Andi Mappanyukki yang waktu itu masih menjabat sebagai raja Bone ke-32 dengan putranya Andi Pangerang Petta Rani dapat dilihat bahwa kedua tokoh ini berperan sebagai patriotik yang konsukuen pada pendiriannya berpihak pada republik di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Tahtanya yang oleh kelompok aristokrat lainnya mungkin sukar untuk ditinggalkan dalam menjatuhkan pilihan untuk setia kepada republik, tetapi Andi Mappanyukki bukanlah menjadi kendala dalam

mendukung perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian pula dengan kebebasannya sebagai manusia biasa yang memiliki atribut kebangsawanan dengan status puncak di masyarakat bukanlah merupakan masalah baginya untuk tetap konsukuen dalam perjuangannya.

Bone yang menjadi kekuasaannya telah dijadikan sebagai salah satu pusat gerakan nasionalisme yang penting untuk kawasan Sulawesi. Dari kawasan Bone inilah semua kegiatan dalam konteks menghimpun gerakan perjuangan rakyat menjelang revolusi 1945 digerakkan. Kemudian dampaknya memang besar karena dari Bone pengaruh gerakan itu tersebar luas di kawasan kekuasaan para bangsawan lainnya. Andi Mappanyukki secara tidak resmi menjadi pimpinan di kalangan penguasa-penguasa feodal di Sulawesi Selatan.

Tampaknya, budaya panutan dalam masyarakat Sulawesi Selatan di zaman perang kemerdekaan masih sangat kuat berperan dalam kehidupan mereka. Ini dapat dibuktikan dari tingkah laku masyarakat yang patuh sepenuhnya kepada apa yang dinyatakan dan diperintahkan oleh bangsawannya. Kelompok bangsawan yang menjadi panutan itu menerima pengabdian total para pendukungnya dalam kaitannya

memberikan dukungan penuh pada republik.

Setelah kemerdekaan, dan daerah Bone menjadi kabupaten, maka peranan bangsawan masih tetap diperhitungkan. Namun tidak lagi seperti pada masa pemerintahan swapraja, di mana yang memegang peranan penting semua dari kalangan bangsawan dan diperoleh secara turun temurun. Derajat kebangsawanan bukanlah merupakan ukuran untuk menentukan tingkat strata masyarakat sosial yang tertinggi, tetapi ada kalanya ditentukan oleh kedudukan, kekuasaan dan peranannya dalam masyarakat termasuk pendidikan, demikian pula dengan keadaan ekonomi sangat menentukan adanya tingkat strata sosial masyarakat Bone.

Dalam hal ini sistem pengangkatan pimpinan pemerintahan bukan lagi semata-mata didasarkan pada derajat dan keturunan kebangsawanan pada masa lampau, akan tetapi juga didasarkan pada tingkat kemampuan dan kecerdasan untuk memimpin dan menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya, dalam hal ini ditentukan juga oleh tingkat pendidikan. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan kecenderungan untuk menghilangkan nilai-nilai kebang-

sawanan terutama dalam proses pelaksanaan pemerintahan.

Namun dalam masyarakat Bone masih tetap diperhatikan kriteria-kriteria sosial yaitu berdasarkan derajat dan keturunan di masa lampau, berdasarkan kedudukan atas kekuasaan dan perannya dalam masyarakat termasuk tingkat pendidikan, dan berdasarkan keadaan ekonominya. Bukan lagi semata-mata didasarkan pada derajat kebangsawannya.

Namun secara keseluruhan perilaku para birokrat di Sulawesi Selatan termasuk di daerah Bone masih sangat kuat diwarnai oleh semangat aristokratis. “Keadaan ini sebenarnya merupakan bagian yang melekat dalam kultur setempat dan pada tingkat tertentu malahan menguntungkan organisasi. Karena dengan semangat itulah pula kewibawaan, pengaruh dan efektivitas kepemimpinan atasan terpelihara”.

Dalam persepsi masyarakat Bugis dan Makassar, para aristokrat itu memang merupakan pimpinan yang sebenarnya dan oleh karena itu, semangat kekuasaannya dirasakan masih layak dilanjutkan. Karena birokrasi pemerintahan tempat kekuasaan itu dikelola, maka tidak mengherankan jika perilaku aristokratis itu tampak secara luas di kalangan birokrat.

Namun demikian banyak masyarakat dari rakyat biasa yang mengakui bahwa keturunan bangsawan yang terdidik dan berbudi baik masih sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat, bahkan lebih berwibawa daripada pimpinan formal yang menduduki suatu jabatan tertentu di dalam pemerintahan. Tetapi dengan mengandalkan kebangsawannya saja, kecuali di tempat atau di daerah tertentu di pedesaan, tak mungkin memiliki pengaruh yang besar di dalam masyarakat.

Golongan bangsawan di daerah Bone, khususnya di pedesaan memang masih berpengaruh terutama di lingkungan keluarga mereka. Terutama dikalangan orang tua, masih tampak penghargaan yang berlebihan terhadap golongan bangsawan ini. Menyatunya nilai kekuasaan tradisional dengan pimpinan formal di Sulawesi Selatan memang berakar pada kenyataan historis yang memperlihatkan bahwa pengaruh aristokrasi tidak pernah tergeser. Kenyataan historis itu terbentuk tidak hanya karena sebagian besar pimpinan formal berasal dari keluarga bangsawan yang memerlukan respek tradisional itu dan membangun citra diri sebagai bangsawan-bangsawan baru.

Posisi para penguasa tradisional di Sulawesi Selatan termasuk di daerah Bone memang tidak pernah tergoyahkan sepanjang perjalanan sejarahnya. Setelah perjanjian Bungaya, hadirnya kekuasaan Belanda di daerah ini pun tidak mampu menerobos sendi-sendi kekuasaan lokal yang telah ada sejak lama. Konflik yang ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakkar yang salah satu targetnya adalah meruntuhkan kekuasaan dan pengaruh kaum bangsawan, ternyata juga gagal mencabut akar-akar aristokrat yang sudah tumbuh ratusan tahun itu.

Secara umum peranan bangsawan setelah terbentuknya kabupaten tidak jauh berbeda, di mana masih banyak bangsawan-bangsawan yang memegang kekuasaan. Andi Mappanyukki yang menjadi kepala daerah pertama merupakan profil bangsawan yang mampu memimpin masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun tidak sedikit pula rakyat umum memegang jabatan dengan berdasarkan pada tingkat pendidikan.

PENUTUP

Andi Mappanyukki merupakan tokoh sentral di kalangan kaum aristokrat. Gagasan dan nasehatnya

terhadap kelompoknya, umumnya didengarkan dan tentu saja ditakuti. Setelah peralihan dari swapraja ke kabupaten peranan bangsawan masih tetap diperhitungkan. Namun tidak lagi seperti pada masa sebelum peralihan, di mana pemerintahan dikuasai oleh raja/aristokrasi. Derajat kebangsawanan bukanlah merupakan ukuran untuk menentukan tingkat strata masyarakat sosial yang tertinggi, tetapi ada kalanya ditentukan oleh kedudukan, kekuasaan dan peranannya dalam masyarakat termasuk pendidikan, demikian pula dengan keadaan ekonomi sangat menentukan adanya tingkat strata sosial masyarakat Bone. Selain karena struktur pemerintahannya memang berbeda juga karena proses pengangkatan kepala pemerintahan juga berbeda. Struktur pemerintahan lama masih merupakan model pemerintahan NIT yang ketika itu berlaku, misalnya masih ada jabatan residen dan kontrolir yang dijabat oleh orang-orang yang berkebangsaan Belanda. Sedangkan untuk daerah swapraja masih ditempatkan penguasa pribumi. Namun secara umum peran bangsawan setelah masa peralihan tidak jauh berbeda, di mana masih banyak bangsawan yang memegang kekuasaan, namun adapula rakyat yang memegang jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed). 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ali, Andi Muhammad. 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Kantor Dikbud Kabupaten Bone.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta : Grafiti Press.
- Kadir, Harun. 1982. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Sulawesi Selatan 1945-1950*, Ujung Pandang : Lephass.
- Kadir, Umar. 1994. *Perjuangan Badan Pemberontakan Rakyat Bone*, Ujung Pandang: UNHAS.
- Kartodirjo, Sartono. 1981. *Elite Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Mappangara, Suriari. 2004. *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mukhlis, Paeni dan Kathryn Robinson. 1985. *Politik dan Kekuasaan di Desa*, Ujung Pandang : Lephass.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta : Dephankam.
- Rismawidiawati. 2016. *Andi Pabbenteng, Raja Bone XXXIII: Hubungannya dengan Belanda (1946 – 1951)* dalam Walasuji Volume 7 Nomor 1 Juni 2016, hlm. 199 – 210.
- Soejito, Irawan. 1984. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Pramita.
- Suryaningrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta : Dewaruci Press.
- Suwarno, P.J. 1989. *Sejarah birokrasi pemerintahan di Indonesia dahulu dan sekarang*. Yogyakarta: penerbit Universitas Atmajaya.